BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan berkembang sebagai bidang studi multidisiplin sehingga sering disebut sebagai *policy sciences* (Hakim, 2011:113). Banyak pengertian tentang kebijakan publik. Jika dilihat dari bidang disiplin ilmu, Sehingga terdapat berbagai macam definisi kebijakan, baik itu secara luas maupun secara sempit.

> Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5), memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai "*whatever government choose to do or not to do."* Jadi apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Yound dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan yang relatif spesifik, yaitu sebagai "*a purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern."* Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan pemerintah (Suharto, 2005:44).

Selain definisi kebijakan publik diatas ada beberapa definisi yang berbeda yaitu menurut Richard Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangakaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan (Agustino, 2006:7).

Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari

sejumlah alternatif pilihan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud memecahkan semua masalah, tetapi memberikan solusi dari suatu situasi yang terbatas.

Sementara itu menurut Easton (1969), kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat (Hakim, 2011:25). Dengan demikian, cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tidakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu:

a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.
e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Agustino, 2006:9).

Diperlukan sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui peninjauan kemiskinan secara nyata tidak lepas dari pendapatan masyarakat yang kecil dengan daya beli masyarakat yang rendah, ketidak berdayaan masyarakat secara informasi dan sosial. Berikut pemaparan salah satu alternatif kebijakan dan program untuk masyarakat miskin. Pada dasarnya upaya penanggulanggan kemiskinan dilaksanakan melalui dua pendekatan atau strategi, yaitu:

a. Meningkatkan pendapatan, melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun politik.
b. Mengurangi pengeluaran, melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Kedua strategi di atas ditempuh melalui empat langkah kebijakan sebagai berikut:

a. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Peningkatan kemampuan atau kapasitas sumberdaya manusia;
d. Perlindungan sosial (Sudarwati, 2009:39)

Kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok: *pertama*, kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan upaya peningkatan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan instrumen kepengaturan yang menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Kerangka kebijakan ini juga mencakup penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan paguyuban atau koperasi.

> *Kedua,* kebijakan langsung diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhandasar berupa pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, peningkatan produktiitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
> *Ketiga,* kebijakan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan sub-sisten menjadi kehidupan pasar. Penyiapan penduduk lebih bersifat stuasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Peran tokoh masyarakat termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi amat penting dalam proses transisi ini (Soesilowati, 2009:72)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan multiaktor dengan beragam kepentingan di mana masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

> Evaluasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu dan terhadap kegiatan yang sedang direncanakan atau sedang berlangsung atau sudah selesai pelaksanaannya, serta dapat bersifat internal maupun eksternal mencakup antara lain mengenai penilaian atas dampak kolektif baik penilaian itu bersifat positif ataupun negatif, dari semua atau sebagian kegiatan yang

> telah dilakukan, pada lokasi dan/ atau kelompok sasaran yang berbeda-beda serta deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat (Suzetta, 2008:83).

Menurut Lester dan dan Stewart (2000) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat mengasilkan dampak yang diinginkan (Agustino, 2006:185).

> Selain itu ada pengertian lain dari evaluasi yaitu menurut Stufflebeam, evaluasi adalah: *process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives*. Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu : adanya sebuah proses (*process*) perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*) informasi yang berguna (*useful information*) dan alternatif keputusan (*decision alternatives*) (http://evaluasipendidikan.blogspot.com diakses pada 19 Oktober 2011).

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jones yang mencoba merumuskan evaluasi kebijakan dengan dihubungkan dengan penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Jones merumuskan evaluasi kebijakan" sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah yang berbeda secara tajam tentang spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya" (Islamy, 2009: 15).

Sejalan dengan pendapat diatas evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan

sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum (Agustino, 2006:185).

Ada tiga hal evaluasi kebijakan yang perlu diperhatikan menurut (Agustino, 2006: 186). yaitu:

a. Evaluasi kebijakan berusaha memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.
b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi.
c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk member sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan (Agustino, 2006:187). Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan yang akan dijabarkan di sini, ialah:

a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:
    1) Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi

kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.

2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan ileh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
3) Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.

b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, seharusnya pemilihan nilai yang tidak didasari oleh kepentingan kelompok tertentu dan kebijakan itu harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai.
c. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternative kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik (Agustino, 2006:187).

Jadi dapat disimpulkan fungsi evaluasi yaitu pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan

ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

3. Jenis-jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Ada beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan jenis atau tipe dari evaluasi kebijakan. Antara lain menurut Putra (2003) terdapat tiga macam evaluasi kebijakan, yaitu:

a) Evaluasi *Administratif* adalah evaluasi kebijakan publik yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi atau umumnya evaluasi ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berkait dengan program tertentu seperti Irjen, Irwil, konsultan swasta, dan sebagainya.sorotan dari evaluasi kebijakan publik ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek finansial dan prosedur kebijakan publik yang dievaluasi. Artinya, bahwa evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk mendapatkan jaminan bahwa apakah yang dilakukan pemerintah lewat proyek tertentu itu benar-benar mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (*the expected goal*) pada tingkat biaya yang paling rendah. Dalam evaluasi administratif terdiri dari :

1) Effort evaluation: Mengevaluasi input program.
2) Performance evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program.
3) Effectiveness evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaanya sesuai dengan sasaran & tujuan.
4) Effeciency evaluaiton: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.
5) Process evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan (http://evaluasipendidikan.blogspot.com diakses pada 19 Oktober 2011).

b) Evaluasi *Yudisial* adalah evaluasi yang dilakukan yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang dievaluasi tersebut. Yang melakukan evaluasi yudisial sebagai pihak utamanya adalah lembaga-lembaga hukum, seperti pengacara, pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya. Yang menjadi titik

amatan dari evaluasi ini adalah utamanya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada pada kebijakan tersebut. Ini berarti menyangkut perlindungan hak dari berbagai pihak atas berjalannya sebuah program kebijakan.

c) Evaluasi *Politik* adalah evaluasi yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik parlemen maupun parpol. Namun sesungguhnya evaluasi politik ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara umum. Evaluasi ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari sebuah kebijakan publik. Hal ini diberi ruang sebab sesungguhnya sudah menjadi kesadaran umum bahwa kebijakan publik itu pada hakikatnya adalah sebuah proses politik. Dengan demikian, sebuah kebijakan publik itu tidak cukup hanya efektif, efisien, ekonomis dan abash secara hukum saja, namun harus pula memiliki baris legitimasi politik yang kuat.

Dengan demikian maka kajian ini yang didalamnya terdapat salah satu jenis evaluasi yang sangat mendasari di dalamnya yaitu jenis *Effort Evaluation* dan *Performance Evaluation* dimana dalam evaluasi kebijakan ini mengevaluasi suatu program yang khususnya membahas tentang penanggulangan kemiskinan.

4. Evaluasi Dampak Kebijakan

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yg sesuai dengan yg diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Menurut (Agustino, 2006:193), dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu:

a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat.
b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain.
c. Kebiijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan evaluasi kebijakan, setidaknya sebagian ada yang menentang penghitungannya.

Evaluasi dampak menurut (Suzetta, 2008:89), adalah jenis evaluasi yang berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Dengan kata lain, sejauh mana hasil atau manfaat dan dampak yang diharapkan telah tercapai. Evaluasi dampak memberikan perhatian besar pada output dan dampak kebijakan. Evaluasi yang dilakukan untuk melihat berbagai hal antara lain yaitu:

a. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.
b. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program.
c. Mengeksplore akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya.
d. Permasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul-betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain (http://evaluasipendidikan.blogspot.com diakses pada 19 Oktober 2011).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi

efisiensi, efektivitas, maupun *outcome* kebijakan. Serta dapat menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif maupun negatif.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat *(community-based development*) yang selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Dan pada dasarnya pemberdayaan itu terletak pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (Hikmat, 2010:3), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang. Demikian pula seperti yang disampaikan oleh Schumacker (Sudarwati, 2009:80) bahwa pemberdayaan adalah menyangkut sebuah kekuatan dalam masyarakat adalah jumlah, maka bisa disebut kekuatan masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan.

Sementara itu menurut Craig dan Mayo, partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan (Hikmat, 2010:3). Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Pemberdayaan dan

partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini diberbagai negara. Hal ini terjadi karena kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyrakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sulistiyani, 2004:80)

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan ketrampilan-ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.

> Kemudian menurut Friedmann ada beberapa strategi yang dapat dipergunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliputi: *pertama*, strategi fasilitasi, dimana dipergunakan ketika masyarakat yang dijadikan target mengetahui ada masalah dan membutuhkan pengubahan, ada keterbukaan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat. *Kedua*, strategi persuasif, berupaya membawa setiap perubahan melalui kebiasaan, dimana pesan distruktur dan dipresentasikan. Jadi persuasi mengacu pada tingkatan reduksi dimana agen perubah mempergunakan emosi dan hal-hal yang tidak rasional untuk melakukan perubahan. *Ketiga*, strategi re-edukasi, diistilahkan dengan reeduksi karena biasanya selalu melibatkan proses justifikasi rasional atas aksi yng dilakukan. Strategi ini membutuhkan waktu khususnya dalam membentuk pengetahuan dan keahlian. Re-edukasi dipergunakan untuk member pemahaman dan penegtahuan baru dalam mengadopsi suatu ubahan. Segmentasi menjadi factor penting untuk membuat pesan agar mudah dimenegrti dan diterima oleh kelompok yang berbeda. Karakteristik demografi merupakan pengkategorian yang umum dipergunakan dalam segmentasi. Segmentasi ini dalam aplikasinya berupa pelatihan, misalnya: pelatiha dalam memanajemen kelompok dan teknis pemeliharaan saran / prasarana. *Keempat*, strategi kekuasaan, sangat efektif karena fasilitator memiliki sumber-sumber untuk memberikan bonus atau sanksi pada target serta memiliki kemampuan untuk memonopoli akses. Pada tataran teknis fasilitator bertindak sebagai konsultan lapangan dapat merekomendasikan/ tidak merekomendasikan nataupun meminta pertanggungjawaban hasil (Soesilowati, 2009:70).

Dikaitkan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ngoro, maka pendapat Friedmann ini sangat sesuai karena pemberdayaan yang dilaksanakan adalah berupa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program GERTAK dengan memaksimalkan gotong royong masyarakat dilingkungan tempat tinggal masyarakat itu sendiri.

3. Tahap-tahap Pemberdayaan

Agar pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Prijono dan Pranarka (1996:2) menjelasakan bahwa sedikitnya diperlukan tiga tahap (fase) yang harus dilalui, yaitu:

1. Tahap inisial, atau disebut pula dengan *Top Down*, dimana pemberdayaan berlangsung dari pemerintah, oleh pemrintah dan untuk rakyat. Pada tahap ini rakyat hanya sebagai obyek dari pemberdayaan, rakyat bersifat pasif, melalukan apa yang direncanakan pemerintah.
2. Tahap partisipatoris, yaitu proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Pada tahap ini masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk menuju kemandirian.
3. Tahap emansipatoris, dimana pemberdayaan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada tahap ini masyarakat sudah dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri dan tahap ini merupakan puncak dari pemberdayaan masyarakat.

Senada dengan priyono dan Pranarka walaupun ada sedikit perbedaan, Sulistiyani (2004:82) menjelaskan bahwa pemberdayaan harus melalui suatu proses belajar, hingga mencapai mandiri. Dan proses belajar ini berlangsung secara bertahap meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri

   Pada tahap ini pihak pemberdaya/actor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

   Pada tahap ini, yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-keterampilan, akan dapat berjalan dengan baik, penuh semangat dan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang terjadi tuntutan kebutuhan mereka. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

   Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian ini akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Pada kondisi ini, masyarakat didudukkan sebagai subyek pembangunan atau sebagai pemeran utama dan pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

4. Strategi Pemberdayaan

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Ketiga strategi tersebut dikemukakan oleh Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994) dalam *Strategies for Community Empowerment: Direct Action qnd Transformative Approaches to Social Change Practice.* Buku tersebut mengkaji pemberdayaan dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya.

a. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
b. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
c. Strategi transformative menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. (Hikmat, 2010:19).

Strategi diatas pada dasarnya mempunyai tiga arah: pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin; kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat; ketiga, modernisasi melalui penjaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada masyarakat lokal.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kita semua menyadari betapa seriusnya masalah kemiskinan meskipun terdapat keinginan untuk menguranginya. Hal utama yang sering menjadi ganjalan

adalah menciptakan pemahaman yang sama tentang kemiskinan. Berikut beberapa definisi kemiskinan yang sering digunakan. Kemiskinan menurut Kuncoro didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Sudarwati, 2009:20). Definisi tersebut mengungkapkan tiga pernyataan dasar yaitu:

a. Bagaimana mengukur standar hidup?
b. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum?
c. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit?

Namun menurut Brendley, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Sudarwati, 2009:22). Hal ini diperkuat oleh Salim yang mengatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. Sedangkan Lavitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Kemiskinan menurut Drewnowski, mencoba menggunakan indikator-indiktor sosial untuk mengukur tingkat-tingkat kehidupan (*the level of living index*). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

a. Kehidupan fisik dasar (*basic fisical needs*), yang meliputi gizi/ nutrisi, perlindungan/ perumahan (*shelter/ housing*) dan kesehatan.
b. Kebutuhan budaya dasar (*basic cultural needs*), yang meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial (*social security*). (Muis, 2010)

c. *High income*, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.

Serta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimum yang layak. Selain itu definisi kemiskinan dilihat dari BAPPENAS yaitu, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Dilihat dari beberapa definisi, maka kemiskinan merupakan masalah sebuah kondisi kekurangan yang dialami sesorang atau suatu keluarga (Suzetta, 2008:12).

Pada dasarnya kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

2. Karakteristik dan Penyebab Kemiskinan

(Sharp, et al yang dikutip Kuncoro, 2004:157) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produksivitasnya rendah dalam artian upah yang didapatkan rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan yang rendah serta nasib yang kurang beruntung. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal berikut ini :

a. Faktor Internal (dari dalam diri individu), yaitu berupa kekurang mampuan dalam hal :
1) Fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
2) Intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.
3) Mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
4) Spritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
5) Sosial psikologis misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/ stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
6) Ketrampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
7) Asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.

b. Faktor Eksternal (berada di luar diri individu atau keluarga), yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain
1) Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
2) Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
3) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.
4) Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak endukung sektor usaha mikro.
5) Belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.
6) Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat.
7) Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural (structural Adjusment Program/ SAP).
8) Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
9) Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
10) Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
11) Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
12) Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin (http://www.ichwanmuis.com. Diakses pada 18 Oktober 2011).

Lain halnya dengan pendapat Chambers (1983) yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, di mana "***deprivation trap***" atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu ;

a. Kemiskinan
b. Kelemahan jasmani
c. Isolasi
d. Kerentanan
e. Ketidakberdayaan (Sudarwati, 2009:27).

Kelima unsur tersebut saling kait mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Jadi kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kondisi fakir miskin tidak mampu:

a. Memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
b. Menampilkan peranan sosial.
c. Mengatasi masalah-masalah sosial psikologis yang dihadapinya.
d. Mengembangkan potensi diri dan lingkungan.
e. Mengembangkan faktor produksi sendiri

Berdasarkan kompleksitas dan keragaman dari dimensi-dimensi kemiskinan, maka penyebab kemiskinan di suatu daerah dengan daerah lainnya bisa sangat berbeda bahkan pada tingkat rumah tangga maupun individu. Sehingga dalam upaya mengetahui akar terjadinya kemiskinan, harus dilihat menurut karakteristik masing-masing. Masyarakat menjadi miskin disebabkan karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak

memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan kehidupan secara layak (Sudarwati, 2009:33). Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek social, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka.

3. Ciri-ciri kemiskinan

Seluruh perkiraan tingkat kemiskinan yang dilakukan di Indonesia mempergunakan hasil dari BPS dan data dari Bank dunia telah didapatkan informasi mengenai ciri-ciri penduduk miskin. Ciri-ciri tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga miskin pada umumnya adalah rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga banyak, yang kepala rumah tangga tersebut merupakan pekerja rumah tangga yang mempunyai tingkat pendidikan rendah dan mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Masalah kemiskinan merupakan masalah Sumber Daya Manusia(SDM), terdapat dua masalah utama dalam pengembangan SDM (Sudarwati, 2009:17). *Pertama,* masih belum berkembangnya SDM. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah, fasilitas kehidupan yang tidak layak, oleh karena itu kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa masih rendah. *Kedua,* masih belum dimanfaatkannya seluruh keterampilan dan kemampuan SDM secara optimal.

Ciri-ciri kemiskinan telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Namun demikian pengertian kemiskinan tersebut mengalami perubahan pula sesuai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kehidupan bangsa di masa mendatang.

4. Jenis-jenis kemiskinan

Menurut Baswir (1997), secara sosio-ekonomi, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:

a. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.
b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan) terdiri dari: kemiskinan natural, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural (Sudarwati, 2009:24)

a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.
b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
c. Kemiskinan structural menurut Baswir (1997) adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Sudarwati, 2009:33).

Dalam program GERTAK ini kemiskinan yang dipakai sebagai acuan adalah kemiskinan absolut. Hal ini disebabkan karena jenis kemiskinan absolut merupakan dimana masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

D. Program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Tempat tinggal adalah merupakan titik awal dari kegiatan manusia dalam kehidupannya. Aktivitas manusia pada umumnya bermula dari tempat tinggal, kemudian keluar untuk bekerja diluar tempat tinggalnya. Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah unit terkecil masyarakat, yang sekaligus dapat dipandang sebagai "*shelter*" bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindungi.

> Sedangkan permukiman berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi. Jadi rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. Jika disuatu daerah telah tumbuh dan berkembang rumah-rumah sebagai suatu proses bermukim, dimana kehadiran manusia dalam menciptakan ruang dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya dinamakan perumahan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah-rumah sebagai tempat bermukim manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Sedangkan permukiman menurut Sudarso adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Soesilowati, 2009:45).

Dengan demikian permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik tata

ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial. Disamping itu juga memeberi rasa aman ,tentram, nyaman, dan sejahtera, dalam keselarasan dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Namun masih banyak masyarakat miskin yang masih menempati rumah yang tidak layak huni. Dengan keadaan yang demikian, maka pemerintahan daerah mengeluarkan program penanggulan kemiskinan yang di fokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Program tersebut dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan pemukiman.

Program Gerakan Serentak (Gertak) adalah program dimana dalam kegiatan ini merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu. GERTAK merupakan program yang dibentuk oleh Bupati Jombang pada tahun 2006. Program ini dititikberatkan pada rumah tangga miskin yang dari sisi sarana dasar belum memenuhi standart kualitas kesehatan. Berikut menurut BPS ada 14 indikator kemiskinan yang mendapatkan bantuan Program GERTAK:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Rus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Program Peningkatan Sarana Penunjang Kesehatan Bagi Rumah Tangga Miskin dilaksanakan berdasarkan indikator kemiskinan terutama pada Jenis lantai rumah berupa tanah, bambu atau kayu murahan. Jenis dinding rumah berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester. Sumber Pendanaan kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten.

Fokus utama program adalah rehabilitasi dan peningkatan sarana dasar perumahan bagi rumah tangga miskin. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran *stakeholder* serta pemerintah desa dilaksanakan untuk mendorong kemandirian dan sinergi berbagai pihak dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan sebagai upaya keberlanjutan program. Hal ini juga akan mendorong penyelarasan dengan program lain, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dan meningkatkan prospek pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan, khususnya kepada masyarakat miskin, pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) dan pengurangan kemiskinan.

Dalam melaksanakan program tersebut perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi untuk keluarga miskin tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menghasilkan, mengefektifkan dan mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, serta mengantisipasi berbagai permasalahan di lapangan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Serentak Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2010 adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 23/A);

j. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 56/A).

2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Serentak Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2010 adalah :

a. Memperdayakan kelompok masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan.

b. Meningkatkan kondisi rumah keluarga miskin agar memenuhi syarat teknis dan syarat kesehatan dan layak untuk dihuni.

c. Menciptakan semangat gotong-royong diantara masyarakat Kabupaten Jombang.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Gerakan Serentak Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2010 Kabupaten Jombang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 masing-masing rumah dibantu sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Diharapkan apabila ada kekurangan dapat dibiayai oleh masyarakat sendiri dalam bentuk swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi pelaksanaan program, sehingga diharapkan capaian keluaran program lebih optimal.

4. Pemilihan Rumah Dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Pemilihan rumah yang akan direhab diserahkan masing-masing Kepala Desa. Dalam melakukan pemilihan rumah supaya dilaksanakan se-selektif mungkin, agar betul-betul tepat sasaran. Pelaksanaan rehabilitasi rumah dilaksanakan secara gotong-royong oleh masyarakat setempat diprioritaskan untuk pekerjaan **plesterisasi , fentilasi udara dan penerangan / genteng kaca.**

Sebelum pelaksanaan rehabilitasi rumah dimulai, terlebih dahulu diawali dengan kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan :

a. BAPPEDA Kabupaten Jombang
b. Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang
c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang
d. Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
e. Kecamatan se wilayah Kabupaten Jombang
f. UPTD Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
g. Kepala Desa/ LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa) penerima program